

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA WANGANDALEM KECAMATAN
BREBES KABUPATEN BREBES**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Islam (S.Sos)
Jurusan Ilmu Politik (IPOL)

Oleh:
Khusuhal Aribina (1806016103)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp:-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
Kepada.
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Khusuhal Aribina

NIM : 1806016103

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wangandalem Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juni 2025

Pembimbing,



Masrohatun, M.Si

NIP. 19880621 2018012001

PENGESAHAN SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRSTRUKTUR
JALAN DI DESA WANGANDALEM KECAMATAN BREBES KABUPATEN
BREBES

Disusun Oleh :

Khusuhal Aribina

1806016103

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 30 Juni 2025 dan dinyatakan lulus.

LULUS

Susunan dewan penguji

Ketua Penguji



Masrohatun, M.Si

NIP. 198806212018012001

Sekretaris penguji

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Nuqlir Bariklana'.

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP. 198505022019031007

Penguji I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Nur syamsudin'.

Drs. H. Nur syamsudin, M.A

NIP. 196805051995031002

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masrohatun'.

Masrohatun, M.Si

NIP. 198806212018012001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khusuhal Aribina
Nim : 1806016103
Tempat/tgl. Lahir : Brebes, 1 Maret 1999
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Semarang, 11 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Khusuhal Aribina

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillahirabbil Alamin* saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi Bapak dan Ibu saya, Bapak Muhamad Idham dan Ibu Sriyulidah yang telah memberikan segala hal yang tidak terbatas untuk kemajuan saya.

Saudara tercinta yang telah memberikan dukungan serta motivasi dan menemani dalam penyelesaian studi ini.

Allahummar hamna bil ilmi wa ridhoka Ya rob

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Wa Syukurilah, Asyhadu Allailahaillallah Wa Asyhaduanna Muhammadarrasulullah, Allahumma Sholiala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad.

Alhamdulillah atas semua nikmat yang diberikan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA WANGANDALEM KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES** Kita ketahui bahwa skripsi merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi sarjana strata-1 di UIN Walisongo Semarang yang berbentuk karya ilmiah.

Penulis tentunya sebagai mahasiswa setelah 4 (Empat) tahun lamanya menempuh studi di jurusan ilmu politik masih banyak keterbatasan keilmuan yang dimiliki, sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini masih alakadarnya dan jauh dari kata sempurna. Harapan kecil penulis tentunya skripsi ini mampu membuka cara pandang baru untuk instansi pemerintahan dalam hal ini pemerintahan desa supaya terjalin pemerintahan yang sehat dalam melaksanakan pembangunan di unsur negara ter kecil dan tentunya dapat memberikan manfaat untuk kita semua *amin allahumma amin.*

Skripsi ini dibuat oleh penulis dengan semangat dan alhamdulillah mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan nikmat kesehatan, keilmuan dan rizeki bagi penulis.
2. Nabi Agung Muhammad Saw yang menjadi inspirator kunci di berbagai lini kehidupan penulis.

3. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan segala hal untuk penyelesaian studi ini.
4. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Prof. Dr. H. Imam yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
6. M Nuqlir Bariklana M.Si, selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo.
7. Masrohatun M, Si., Selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan banyak masukan dan transfer ilmu kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu pengetahuan baru sampai penulis menyelesaikan Program Studi Sarjana Ilmu Politik.
9. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang banyak membantu dalam proses keadministrasian selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Sahabat-sahabati, sedulur, rekan dan kolega organisasi di dalam ataupun di luar kampus yang secara tidak langsung memberikan pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa untuk penulis.
11. Penulis juga ingin mengucapkan trimakasih yang mendalam kepada pemerintahan Desa wangandalem dimana tempat penulis melakukan penelitian dan sangat sabar memberikan arahan dan penjelasan akan apa yang penulis butuhkan selama penelitian berlangsung, kepada Bapak Siswondo selaku kepala desa, Bapak rosikin selaku sekdes, dan seluruh masyarakat yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Dan untuk teman-teman kelas ilmu politik C 2018 yang selama ini menemani belajar di kampus hingga menjadi keluarga besar kedua di tanah rantau yang tidakbisa saya sebutkan namanya satu persatu.

13. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Sesungguhnya apa yang saya raih, ada buah yang mereka tanamkan dan penulis meyakini mereka semua pasti mendaPaTKan manfaat dikemudian hari. Tentu saja masih banyak pihak yang belum diseBuTKan oleh penulis, jadi mohon maaf dan terima kasih banyak. Penulis juga secara khusus meminta maaf kepada seluruh pihak diatas karena pastinya tidak luput dari kesalahan.

“Semua orang bisa melakukan dan menyelesaikan, tetapi hasilnya pasti berbeda-beda, sekian dan terima kasih”.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

MOTTO

**“ SESEORANG YANG BERSABAR TIDAK AKAN PERNAH KEHILANGAN
KESUKSESAN MESKIPUN MEMBUTUHKAN WAKTU YANG LAMA
UNTUK MENCAPAINYA”**

“ALI BIN ABI THALIB”

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Wangandalem.....	23
Tabel 3. 2 Usia Penduduk Desa Wangandalem.....	24

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	1
BAB I	2
PENDAHULUAN.....	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. TINJAUAN PUSTAKA	7
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	13
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI	14
A. KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT	14
B. KONSEP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA.....	19
BAB III.....	23
GAMBARAN UMUM SERTA LOKASI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.

A. GAMBARAN UMUM	23
B. GAMBARAN KHUSUS	26
BAB IV	46
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	
INFRASTRUKTUR DI DESA WANGANDALEM.....	46
A. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	
INFRASTRUKTUR DI DESA WANGANDALEM.....	Error! Bookmark not defined.
B. FACTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PARTISIPASI	
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA	
WANGANDALEM.....	57
BAB V.....	62
PENUTUP	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	64

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga desa yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di desa tersebut terbagi dalam tiga bentuk utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi fisik, dan partisipasi finansial. Keberhasilan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kombinasi beberapa faktor penting, antara lain kesadaran warga yang tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta kepemimpinan yang efektif dari pemerintah desa. Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat yang memengaruhi tingkat partisipasi, yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan penghasilan warga yang menyebabkan ketimpangan dalam partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas partisipasi, perlu ada upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi di desa, serta penguatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kata kunci : partisipasi, pembangunan, infrastruktur

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut adanya pembangunan yang optimal agar mampu mengikuti berbagai perubahan yang terjadi. Di Indonesia, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mengenai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan desentralisasi memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk mengembangkan wilayahnya berdasarkan potensi lokal yang dimiliki. Saat ini, pemerintah tengah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala, terutama di wilayah pedesaan.

Pembangunan di desa sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Infrastruktur jalan, sebagai salah satu prasarana dasar, memiliki peran strategis dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemajuan suatu desa. Untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur pedesaan, dibutuhkan strategi yang matang dan terencana (Suja et al., 2025).

Desa Wangandalem yang terletak di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, merupakan salah satu desa yang tengah mengalami perkembangan dalam pembangunan infrastruktur, terutama pada sektor jalan desa. Namun, keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah saja, melainkan juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek

pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada kontribusi tenaga dan dana, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan.

Desa Wangandalem dipilih sebagai lokasi penelitian karena proses pembangunan infrastrukturnya dinilai belum optimal. Hal ini tercermin dari kondisi jalan desa yang mengalami kerusakan di sejumlah titik. Kerusakan infrastruktur jalan di Desa Wangandalem berdampak langsung pada terganggunya aktivitas masyarakat yang sangat bergantung pada akses jalan tersebut. Sebagai desa dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, kondisi jalan yang rusak menghambat mobilitas mereka dari rumah menuju lahan pertanian. Hal ini tentu memengaruhi produktivitas dan kelancaran pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan ini agar pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (observasi, 10/5/2025).

Dalam konteks otonomi daerah dan pendekatan pembangunan partisipatif, peran serta masyarakat lokal sangat penting guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkelanjutan, dan memiliki rasa kepemilikan dari warga setempat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran, kurangnya informasi, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi antara pemangku kepentingan.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah. Namun, dalam implementasinya, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Wangandalem masih belum optimal. Salah satu indikator kurangnya partisipasi tersebut terlihat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes), di mana kehadiran dan kontribusi masyarakat masih tergolong minim (observasi, 10/5/2025).

Ketidakhadiran masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) berdampak pada rendahnya partisipasi dalam menyampaikan ide, gagasan, maupun saran terkait proses pembangunan. Akibatnya, program pembangunan yang dijalankan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Kondisi ini tentu merugikan, mengingat keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada keselarasan pandangan antara pemerintah desa dan warganya guna mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) merupakan wadah bagi para pelaku pembangunan untuk menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah. Salah satu prasyarat penyusunan rencana pembangunan di tingkat nasional maupun tingkat I dan II pemerintah daerah adalah Musrenbang yang telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi landasan hukum pelaksanaannya..

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk membahas masalah yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Demikian pengaturan mengenai MUSRENBANG di tingkat penyelenggaraan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya partisipasi atau keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Keterlibatan ini diharapkan mampu mencegah serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Suherman & Muluk, 2008).

Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berikut ini disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa: “Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa.”

Hasil ekplorasi jurnal terkait dengan pembangunan infrastruktur desa, Riskayanti, 2022 mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, masih tergolong rendah, khususnya dalam bentuk partisipasi pemikiran. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, yang disebabkan oleh adanya pembatasan dari pihak pemerintah terhadap peran masyarakat dalam merumuskan permasalahan pembangunan. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap apatis terhadap pembangunan infrastruktur, terutama dalam tahapan perencanaan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Begitu pula, Mahendra, Maesaroh, and Widowati 2022 mengungkapkan bahwa Partisipasi masyarakat di Desa Karangwotan dalam pembangunan infrastruktur belum berjalan secara optimal. Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes), serta kurangnya upaya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Pada hakikatnya, Peranan masyarakat tersebut sangatlah penting karena dalam perencanaan pembangunan, masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan (Suherman & Muluk, 2008).

Berdasarkan konteks tersebut, peneliti tertarik untuk membahas topik "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat Desa Wangandalem dalam pembangunan infrastruktur jalan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat keterlibatan mereka. Dengan memahami dinamika partisipasi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pembangunan desa yang lebih inklusif dan berbasis pada aspirasi serta kebutuhan masyarakat lokal.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk menggambarkan pertanyaan penelitian penulis menetapkan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Wangandalem?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Wangandalem?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Wangandalem.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Wangandalem.
3. Untuk menganalisis faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Wangandalem.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian yang direncanakan harapan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan perbandingan di masa depan dan akan memberikan kontribusi berharga terhadap pemikiran ilmiah untuk melengkapi studi-studi yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Wangandalem Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan penulis, yang memungkinkan penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi berharga bagi pemikiran dan pandangan tentang bagaimana masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Desa Wangandalem Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian literatur terdahulu yang sudah ada menunjukkan bahwasanya ada beberapa sarjana yang sudah meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa, sebagai berikut:

1. Riskayanti, 2022 “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, masih tergolong rendah, khususnya dalam bentuk partisipasi pemikiran. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, yang disebabkan oleh adanya pembatasan dari pihak pemerintah terhadap peran masyarakat dalam merumuskan permasalahan pembangunan. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap apatis terhadap pembangunan infrastruktur, terutama dalam tahapan perencanaan seperti

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Namun demikian, partisipasi masyarakat masih dapat ditemukan dalam bentuk lain, seperti partisipasi tenaga melalui kegiatan gotong royong dan kerja bakti, partisipasi keahlian yang diwujudkan melalui keterampilan yang dimiliki oleh warga, partisipasi barang berupa alat dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, serta partisipasi dana yang diberikan dalam bentuk sumbangan uang, baik secara langsung maupun melalui prosedur yang telah ditetapkan.

2. Mahendra, 2022 “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Partisipasi masyarakat di Desa Karangwotan dalam pembangunan infrastruktur belum berjalan secara optimal. Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes), serta kurangnya upaya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan

Meskipun demikian, terdapat pula sejumlah faktor yang mendorong partisipasi masyarakat, seperti adanya kesempatan untuk terlibat, kemauan individu untuk berpartisipasi, serta kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

3. Putri Daulay, 2022 “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Pulau Busuk di Kecamatan Inuman memiliki tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa yang tergolong sedang. Nilai rata-rata untuk keempat kategori keterlibatan masyarakat adalah 50,19%, yang berada di antara 40 dan 60% pada skala Likert. Di Desa Pulau Busuk, usia,

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lama tinggal merupakan beberapa variabel yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa..

4. Fatmawati, 2024 “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur”. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat pada umumnya turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa. Meskipun demikian, beberapa orang memilih untuk tidak berpartisipasi. Sumbangan masyarakat Desa Putemata meliputi ide, semangat, keanggotaan, dan barang dagangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara umum kegiatan ini sudah baik. Namun, tidak ada bukti keterlibatan secara finansial..

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada tema yang diangkat, yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Sementara itu, perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang menjadi fokus kajian, yakni di Desa Wangandalem. Lokasi yang berbeda ini memberikan konteks dan dinamika sosial yang unik, sehingga dapat memperkaya kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di tingkat desa.

F. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian penulis menjelaskan beberapa informasi diantaranya, jenis penelitian, sumber data penelitian, dan teknik pengumpulan data:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi rakyat dalam musrenbangdes. Pendekatan kualitatif digunakan dalam seluruh mekanisme penelitian, mengumpulkan data naratif yang mencakup teks asli dari individu, kata-kata tertulis, dan sikap yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas secara mendalam, dengan usaha untuk meresapi makna dan mengurai gejala-gejala yang

bersifat subjektif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyajikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut (Nursapia, 2020).

Penelitian kualitatif digunakan untuk menginvestigasi objek yang berada dalam konteks alamiah. Peneliti bertindak sebagai instrument utama dalam proses ini, dan teknik pengumpulan data seringkali menggabungkan berbagai metode (triangulasi). Hasil dari penelitian kualitatif cenderung lebih fokus pada pemahaman makna dari data yang ditemukan (Sugiyono, 2016).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan studi kasus. Menurut Hardani, studi kasus memanfaatkan semua hal yang penting bagi latar belakang atau perkembangan suatu kasus. Ia berusaha memahami siklus hidup suatu unit individu, atau sebagian darinya, baik itu orang, keluarga, kelompok, atau institusi sosial dalam masyarakat. tujuan penelitian studi kasus adalah untuk menyelidiki unit sosial tertentu, seperti orang, organisasi, institusi atau masyarakat secara luas, secara lebih rinci (Hardani, 2020).

2. Sumber dan jenis data

Sumber data kualitatif berkaitan erat dengan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dan sering kali mengungkap aspek-aspek subjektif, kompleks, dan kontekstual dari fenomena tersebut. Sumber data penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah jenis sumber data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau lokasi penelitian dengan melakukan studi lapangan secara langsung (Sugiyono, 2016). Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan obyek penelitian atau subjek yang relevan dalam penelitian tersebut. Ini dapat mencakup berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, survei, eksperimen, atau pencatatan langsung untuk penelitian ini data primer hasil yang diperoleh dari wawancara penelitian dari informan terkait.

b. Data skunder

Data skunder ialah merujuk pada data yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan. Data ini dapat berupa jurnal, internet, artikel, dan buku yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Metode wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan yang memiliki maksud tertentu antara dua pihak. Wawancara merupakan metode yang digunakan oleh pewawancara untuk mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai (Sugiyono, 2016). Wawancara memiliki beberapa macam-macam jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Melalui teknik wawancara maka peneliti mendapatkan informasi secara langsung dari responden yang terdiri informan adalah kepala desa, kaur perencanaan, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat yang merasakan dan mengalaminya.

b. Mode pengamatan (Observasi)

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung atau terjun ke objek yang sedang diteliti. Dalam observasi, peneliti secara aktif mengamati situasi, perilaku, atau fenomena yang relevan dengan penelitian tanpa campur tangan atau memengaruhi objek yang diamati. Hasil dari observasi ini kemudian dapat dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan tentang apa yang telah diamati. Observasi dalam penelitian ini untuk mendetailkan profil Desa Wangandalem.

c. Dokumentasi

Dokumen merujuk pada catatan atau rekaman insiden yang sudah terjadi. Dokumen dapat berbentuk sejarah, tulisan tangan, gambar, atau format lainnya (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumen sebagai sumber informasi untuk mengetahui data terkait variabel-

variabel tertentu, seperti catatan transkrip, surat keterangan, buku, prasasti, rekapan hasil MUSRENBANGDes, dan sumber dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Dokumen sering digunakan untuk menyediakan data historis dan kontekstual yang dapat mendukung analisis penelitian.

Analisis dokumen adalah alat yang sangat penting dan berguna didalam penelitian, terutama ketika data lapangan terbatas atau sebagai tambahan untuk data yang telah ada, peneliti dapat memperkaya penelitian mereka dengan informasi yang relevan dan mendalam.

4. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Teknik deskriptif kualitatif adalah strategi yang digunakan untuk analisis data. Tujuan dari metode penyelidikan deskriptif adalah untuk menggambarkan secara akurat sifat, orang, keadaan, kejadian, atau kelompok tertentu. Dengan kata lain, pendekatan ini digunakan untuk mengkarakterisasi, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari temuan penelitian.

Analisis data adalah suatu proses penting dalam penelitian yang melibatkan pengolahan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, atau materi lainnya. Tujuannya adalah untuk menyelidiki, mengorganisasi, dan menyusun data secara sistematis sehingga informasi yang terkandung dalam data dapat dipahami dengan lebih baik dan hasilnya dapat disampaikan dengan jelas kepada orang lain (Sugiyono, 2016).

Tiga alur dalam analisis data kualitatif yaitu :

a. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah tahap kunci dalam analisis data yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan atau sumber data lainnya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan data yang tidak relevan, memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang paling penting, dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil

penelitian.

b. Penyajian data (*Data display*)

Setelah direduksi, yaitu persiapan data atau penyajian data. Persiapan data merupakan tahap penting dalam proses analisis data karena memungkinkan peneliti untuk mengkomunikasikan temuan dan hasil penelitian kepada audiens dengan cara yang lebih jelas dan efektif. memudahkan pemahaman tentang situasi yang terjadi, serta membantu perencanaan langkah-langkah selanjutnya (Sugiyono, 2016).

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah elemen penting untuk mengartikan makna temuan dan memberikan dasar konseptual yang kuat untuk hasil penelitian tersebut. Ini membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan memberikan kontribusi berharga terhadap literatur penelitian yang telah ada (Sugiyono, 2016).

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Dalam penyusunan hasil penelitian, membagi temuan penelitian menjadi enam bab yang masing masing BAB berisi pembahasan inti yang mendukung BAB lainnya, sehingga membentuk suatu karya yang runtut dan mudah dipahami:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan perihal uraian-uraian yang mendasari penelitian ini mencakup: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan landasan teori mencakup berbagai sudut pandang professional mengenai topic penelitian. Teori-teori yang diberikan selanjutnya akan menjadi landasan dalam menyusun penelitian.

BAB III : PROFIL DESA WANGANDALEM

Bab ini memuat potret masyarakat. penulis mencoba memperjelas beberapa hal, seperti keadaan Desa Wangandalem, letak, dan keadaan pemerintahan desa.

BAB IV : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Bab ini memaparkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari objek penelitian. berupa penyajian temuan analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini memuat penutup yang disimpulkan pada penelitian ini, yang mencakup kesimpulan, saran, bagaimana memperbaiki hal-hal ke depan, kritik dan catatan akhir.

BAB II

LANDAAN TEORI

A. KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Pengertian Partisipasi

Kita sering mendengar kata "partisipasi" dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam komentar para ahli maupun dalam obrolan santai dengan orang lain. Hingga saat ini belum ada satu pun definisi partisipasi yang diakui secara luas. Beragamnya sudut pandang yang digunakan untuk mendefinisikan gagasan partisipasi itu sendirilah yang menyebabkan perbedaan pemahaman ini.

Secara umum, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan individu dalam suatu kegiatan, terutama dalam konteks organisasi, guna mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama (Rahman & Rosmita, 2019). Jika dikaitkan dengan konteks pembangunan, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata "partisipasi" dalam bahasa Latin berasal dari kata "*pars*" yang berarti bagian dan "*capere*" yang berarti partisipasi dalam tindakan atau peristiwa politik suatu negara. Makna gabungan kedua kata ini adalah "mengambil bagian". Kata "*participate*" dan "*participation*" dalam bahasa Inggris menunjukkan tindakan ikut serta atau aktif dalam suatu kegiatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, "partisipasi" mengacu pada keterlibatan dalam aktivitas politik maupun pembangunan dalam suatu negara.

Mulyadi Muhammad, (2009) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan suatu program, di mana masyarakat juga turut merasakan manfaat dari kebijakan atau program yang dijalankan. Selain itu,

dalam tahap evaluasi, keterlibatan masyarakat juga sangat penting agar proses pembangunan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Melalui partisipasi yang menyeluruh ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara menyeluruh partisipasi dapat didefinisikan sebagai keikutsertaan seseorang atau kelompok orang sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan seseorang tersebut didalam kelompok sosial bertujuan untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya di luar pekerjaan atau profesinya.

2. Jenis Partisipasi Masyarakat

Adapun beberapa jenis partisipasi menurut Mulyadi Muhammad, (2009) sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam konteks perencanaan pembangunan merupakan bentuk keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pembangunan desa (Mulyadi Muhammad, 2009). Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui kehadiran dalam rapat-rapat pembangunan desa, penyampaian pendapat dan masukan selama rapat berlangsung, pemberian informasi yang relevan, serta partisipasi aktif dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan pembangunan. Peran serta masyarakat dalam tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga setempat (Agustin, 2020).

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam tahap pelaksanaan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang tidak hanya terbatas pada proses perencanaan, tetapi juga mencakup peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa (Mulyadi Muhammad, 2009). Pada tahap ini, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang lebih konkret, baik dalam bentuk tenaga kerja (seperti gotong

royong), sumbangan dana, maupun penyediaan bahan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan. Keterlibatan langsung ini mencerminkan rasa memiliki terhadap program pembangunan serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat (Palimbunga, 2017).

c. Partisipasi dalam Pemanfaatan

Partisipasi dalam tahap kemanfaatan merupakan perwujudan nyata dari peran serta masyarakat dalam kehidupan desa, yang menunjukkan sejauh mana keterlibatan mereka memberikan dampak positif bagi kemajuan pemerintah desa dan masyarakat secara keseluruhan (Mulyadi Muhammad, 2009). Bentuk partisipasi ini dapat terlihat melalui berbagai kegiatan, seperti menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, ikut serta secara sukarela dalam menjaga keamanan lingkungan, serta berperan aktif dalam program-program desa, termasuk kelompok usaha di bidang ekonomi. Keterlibatan ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan local (Juk *et al.*, 2024).

d. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam tahap evaluasi merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan (Mulyadi Muhammad, 2009). Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui penyampaian kritik, argumen, maupun saran yang konstruktif terhadap jalannya proses pembangunan. Hal yang paling penting dalam partisipasi evaluatif adalah kemampuan masyarakat untuk memberikan penilaian yang objektif, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai masukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pembangunan di masa mendatang (Suaib, 2023).

3. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Tingkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan, sehingga perlu dipahami secara mendalam oleh para agen pembangunan. Untuk itu, pemahaman yang tepat mengenai indikator evaluasi tingkat partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Dalam upaya mengukur partisipasi tersebut, (Netrianni Sipatuhar, 2023) mengemukakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam lima tahapan, yaitu:

a. Informasi (*Information*)

Tahap paling dasar di mana masyarakat hanya menerima informasi mengenai rencana atau pelaksanaan pembangunan tanpa adanya ruang untuk memberikan masukan atau tanggapan.

b. Konsultasi (*Consultation*)

Pada tahap ini, masyarakat mulai diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pihak penyelenggara atau pemerintah.

c. Melibatkan (*Deciding Together*)

Masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan bersama, sehingga aspirasi mereka lebih diperhatikan dalam penetapan kebijakan atau program pembangunan.

d. Bermitra (*Acting Together*)

Tahap partisipasi yang lebih tinggi di mana masyarakat dan pemerintah bekerja sama secara sejajar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

e. Mendelegasikan (*Supporting Independent Community Initiatives*)

Tingkatan tertinggi dari partisipasi, di mana masyarakat diberi kewenangan penuh untuk mengelola dan menjalankan inisiatif pembangunan secara mandiri dengan dukungan dari pemerintah atau lembaga lain.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan antara lain:

- 1) Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pembangunan di lingkungan mereka.
- 2) Adanya ruang dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
- 3) Kepemimpinan yang partisipatif, di mana pemimpin desa membuka komunikasi dua arah dan mendorong keterlibatan warga.
- 4) Ketersediaan informasi mengenai program pembangunan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
- 5) Adanya manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat dari pembangunan tersebut, sehingga menumbuhkan rasa memiliki.

b. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat meliputi:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan.
- 2) Minimnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dan kegiatan pembangunan.
- 3) Ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang menyebabkan sikap apatis dari masyarakat.
- 4) Tingkat pendidikan dan pemahaman yang rendah, sehingga masyarakat merasa tidak mampu atau tidak percaya diri untuk berpartisipasi.

- 5) Keterbatasan waktu dan ekonomi, yang membuat masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari daripada mengikuti kegiatan desa.

B. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

1. Konsep Pembangunan

Mahendra, 2022 mendefinisikan pembangunan sebagai suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh suatu negara, yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan utama dari pembangunan adalah mewujudkan modernitas yang berkelanjutan dalam rangka memperkuat proses pembinaan bangsa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Menurut beberapa aturan, pembangunan sering dipahami sebagai proses perubahan berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik. Definisi pembangunan yang berbeda, termasuk perencanaan, ditawarkan oleh para profesional. Frasa "pembangunan" dapat memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, tempat yang berbeda, dan negara yang berbeda.

Pembangunan, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, adalah upaya untuk berkembang dari satu keadaan dan situasi sosial ke keadaan dan situasi sosial lain yang dianggap lebih unggul (lebih diinginkan). Sebaliknya, Rostow, mengutip Mansor Fakih, mendefinisikan pembangunan sebagai sesuatu yang terkait dengan perubahan sosial, yaitu pembangunan yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau menggeser masyarakat dari modernitas konvensional. Tahap-tahap masyarakat tradisional, kondisi tinggal landas, kedewasaan, dan fase konsumsi massal semuanya diperlukan untuk pertumbuhannya. Tahap tinggal landas, yang didorong oleh satu atau lebih sektor, merupakan fase yang paling penting dari semua fase ini.

Menurut Siagian (2007), Dalam konteks pembangunan bangsa, pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian rencana dan tindakan yang disengaja untuk pertumbuhan dan perubahan yang dilaksanakan oleh suatu negara, negara bagian, dan pemerintah ke arah modernitas.

Menurut Todaro dan Smith (2011), "*Development is a multidimensional process involving major changes in social structures, popular attitudes, and national institutions, as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequality, and the eradication of absolute poverty.*" Artinya, pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan kualitas hidup.

Menurut Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia), pembangunan adalah suatu upaya yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan sering kali dapat dilihat sebagai suatu proses perencanaan sosial (*social plan*) yang dilakukan oleh para birokrat perencanaan pembangunan untuk melaksanakan perubahan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai terkait erat dengan pembangunan, yang sering kali bersifat transendental, fenomena metadisiplin, atau bahkan ideologi pembangunan. Pemilihan epistemologi-ontologi sebagai kerangka filosofis dan derivasinya pada tataran strategi, program, atau proyek dengan demikian merupakan contoh anomali nilai (*value choices*) yang selalu dilakukan oleh para ahli, pembuat kebijakan, dan perencana pembangunan.

2. Konsep Infrastruktur

Infrastruktur merupakan elemen dasar yang berperan penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan suatu wilayah. Secara umum, infrastruktur dapat diartikan sebagai segala bentuk fasilitas fisik dan sistem yang dibangun untuk menunjang kelancaran berbagai kegiatan masyarakat.

Infrastruktur merupakan seluruh fasilitas fisik dan sistem dasar yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan keseharian masyarakat maupun negara. Infrastruktur meliputi sarana dan prasarana seperti

jalan, jembatan, listrik, air bersih, pelabuhan, bandara, jaringan komunikasi, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Menurut World Bank (1994), "*The basic physical and organizational structures and facilities (e.g., buildings, roads, power supplies) needed for the operation of a society or enterprise*". Infrastruktur mencakup layanan publik seperti transportasi, irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi, energi, dan komunikasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Grigg (1988), infrastruktur dibagi menjadi dua jenis:

- a. Infrastruktur fisik (keras): mencakup sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, bangunan, jaringan listrik, air bersih, dan fasilitas transportasi.
- b. Infrastruktur sosial (lunak): mencakup institusi, peraturan, dan sistem pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pemerintahan yang efektif.

Sedangkan fungsi infrastruktur, menurut Nasution (2006):

- a. Meningkatkan konektivitas dan mobilitas orang serta barang.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- d. Mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah.

Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor kunci dalam mengurangi kesenjangan wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN KHUSUS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA WANGANDALEM

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Desa Wangandalem

Desa Wangandalem terletak di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Desa ini memiliki asal-usul yang cukup menarik. Konon, terdapat beberapa candi tua yang menjadi bagian dari sejarah desa, yang kini berada di dalam sebuah sumur. Sumur tersebut saat ini berada di lahan milik pribadi, tepatnya di pekarangan rumah warga yang tinggal di dekatnya.

Mayoritas penduduk Wangandalem bermata pencaharian sebagai petani bawang merah. Selain itu, banyak juga yang berprofesi sebagai pedagang atau pengepul bawang merah, yang dalam bahasa sehari-hari disebut "bakul" atau "bos" bawang. Bahkan, hampir semua tetanggaku bekerja sebagai bakul bawang. Hasil panen bawang dari para bakul ini biasanya dipasok ke berbagai pabrik mi.

Secara geografis, Wangandalem berbatasan dengan Desa Padasugih di sebelah utara, Desa Terlangu di sebelah barat, Desa Pemaron di selatan, dan Desa Krasak di sebelah timur.

2. Struktur Organisasi Desa Wangandalem

JABATAN	NAMA
Kepala Desa	SISWONDO
Sekretaris Desa	ROSIKIN
Kaur Umum	IRFAN ALI, S.Pd
Kaur Perencanaan	ADE SITI NURJANAH
Kaur Keuangan	IIN INDRIANI, Amd.

Kasi Pemerintahan	WINA AGUSTINA
Kasi Kesejahteraan	SUID AIDI
Kasi Pelayanan	LILI ANDALUSI

3. Karakteristik Sumber Data

a. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Desa Wangandalem tercatat sebanyak 4.849 jiwa dengan total 458 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.469 jiwa atau sekitar 52% merupakan penduduk laki-laki, sedangkan 2.380 jiwa atau sekitar 48% merupakan penduduk perempuan.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Desa Wangandalem

No	Kategori	Jumlah
1	Laki-laki	2.469
2	Perempuan	2.380
	Total	4849

Sumber: profil desa wangandalem

b. Usia

Mengetahui struktur umur penduduk sangat penting karena dapat memberikan informasi yang berguna dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui data struktur umur, kita bisa mengidentifikasi jumlah penduduk usia sekolah, potensi tenaga kerja, serta kebutuhan layanan sosial lainnya. Struktur umur penduduk Desa Wangandalem disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Usia Penduduk Desa Wangandalem

No	Kelompok Usia	Jumlah
1	Usia Balita	497
2	Usia Sekolah	1508
3	Usia Kerja	2275
4	Usia Lanjut	569
	Total	4849

Sumber: profil desa wangandalem

Tabel di atas memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan penduduk di desa yang bersangkutan. Dari data tersebut terlihat bahwa kelompok usia kerja merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah. Selain itu, pendidikan juga berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menjadi kunci dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Tingkat pendidikan sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM); semakin tinggi kualitas SDM, maka semakin besar pula peluang suatu daerah untuk mencapai kemajuan pembangunan yang lebih pesat.

d. Pekerjaan

Penduduk Desa Wangandalem memiliki mata pencaharian yang beragam. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pertanian, terutama sebagai petani, yang merupakan sumber mata pencaharian utama di desa ini. Selain bertani, ada juga warga yang bekerja sebagai pedagang, guru,

dan berbagai profesi lainnya. Rincian jenis pekerjaan penduduk Desa Wangandalem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Wangandalem

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun	2552
2	Pegawai Negeri Sipil	25
3	Pegawai Swasta	54
4	Pensiunan	17
5	ABRI	5
6	Industri/Wiraswasta	73
7	Pertukangan	121
8	Guru	302
9	Pelajar/Mahasiswa	248
10	Bidan/Tenaga Medis	10
11	Pedagang	823
12	Belum/Tidak Bekerja	619
	Total	4849

Sumber: profil desa wangandalem

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa Wangandalem bekerja sebagai petani/pekebun sebanyak 2552 jiwa.

B. GAMBARAN KHUSUS

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wangandalem

Partisipasi masyarakat di Desa Wangandalem dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dalam beberapa bentuk, antara lain:

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam konteks pengambilan keputusan diwujudkan melalui kehadiran dalam rapat-rapat pembangunan desa, penyampaian pendapat dan masukan selama rapat berlangsung, pemberian informasi yang relevan, serta partisipasi aktif dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan pembangunan.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses ini menjadi indikator penting dari sejauh mana mereka berpartisipasi dalam pembangunan. Semakin besar kemampuan masyarakat untuk menentukan arah dan nasib mereka sendiri, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Siswondo, selaku Kepala Desa Wangandalem, beliau menyampaikan bahwa:

“Sebagian besar pembangunan di Desa Wangandalem merupakan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan bersama masyarakat. Dengan demikian, ide dan gagasan awal pembangunan secara tidak langsung berasal dari partisipasi aktif warga Desa Wangandalem. Oleh karena itu, masyarakat desa ini memang telah berperan serta secara nyata dalam proses pembangunan”.

Pernyataan ini menegaskan bahwa proses musyawarah yang melibatkan masyarakat secara langsung menjadi salah satu pilar utama dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan.



Gambar 3.1 Musrenbang di Desa Wangandalem

Hal ini dipertegas oleh Bapak Irfan selaku Kaur umum Desa Wangandalem yang menyatakan bahwa:

“Pembangunan yang dilaksanakan merupakan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pada setiap pertemuan, para peserta rapat sering memberikan kontribusi berupa ide maupun gagasan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Wangandalem”.

Dari pernyataan ini, jelas bahwa setiap rapat bukan hanya sekadar forum untuk mendengarkan laporan atau informasi, tetapi juga menjadi ruang terbuka bagi warga untuk memberikan masukan yang sangat berharga bagi proses pembangunan desa.

Tak hanya para pejabat desa, tokoh masyarakat pun turut memberikan pandangan yang sangat positif terhadap peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Sebagai contoh, Bapak Tansrif, salah satu tokoh masyarakat Desa Wangandalem, menyatakan:

“Peserta rapat itu sering memberikan sumbangsi idenya ataukah sekaligus gagasan yang tentunya terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang ada”.

Pendapat ini menunjukkan bahwa masyarakat tak hanya hadir sebagai pendengar pasif, tetapi mereka juga aktif menyumbangkan pemikiran yang konstruktif, yang pada akhirnya memperkaya proses perencanaan pembangunan. Hal senada diungkapkan oleh informan lain yang diwawancarai yaitu Ibu Nurhayati yang mengatakan bahwa:

“Biasanya peserta rapat memberikan sumbangsi idenya terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Desa”.

Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pembangunan di Desa Wangandalem merupakan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan bersama masyarakat. Ide dan gagasan pembangunan ini, yang secara langsung berasal dari partisipasi aktif warga, menggambarkan betapa pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan desa. Proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap kemajuan desa mereka. Dengan adanya partisipasi aktif, pembangunan yang dilaksanakan menjadi lebih relevan, berkelanjutan, dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.

b. Partisipasi Fisik

Pada tahap ini, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang lebih konkret, baik dalam bentuk tenaga kerja (seperti gotong royong), sumbangan dana, maupun penyediaan bahan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan. Keterlibatan langsung ini mencerminkan rasa memiliki terhadap program pembangunan serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Partisipasi fisik yang dimaksud di sini adalah keterlibatan masyarakat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan bakti atau gotong royong biasanya

dilakukan sekali dalam seminggu atau minimal dua kali dalam sebulan. Kegiatan tersebut meliputi membersihkan saluran air, memperbaiki jalan, membersihkan kantor desa, membuat atau memperbaiki jembatan, serta berbagai kegiatan lain yang memerlukan partisipasi langsung dari masyarakat.

Namun, meskipun kegiatan ini dilaksanakan dengan semangat gotong royong, masih terdapat kendala dalam hal partisipasi penuh dari seluruh warga desa. Bapak Siswondo, Kepala Desa Wangandalem, dalam wawancaranya menyampaikan:

“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan biasanya terlihat dalam bentuk kegiatan pembersihan atau kerja bakti di area yang akan dibangun. Namun, seringkali hanya warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut yang hadir, sementara warga dari daerah lain cenderung tidak ikut serta. Hal yang sama juga terjadi ketika kegiatan dilakukan di daerah mereka, kami pun terkadang tidak datang”.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa meskipun semangat gotong royong sangat kental, partisipasi fisik tidak selalu merata di seluruh desa. Faktor kedekatan geografis seringkali memengaruhi tingkat keterlibatan warga. Namun, meskipun demikian, partisipasi yang ada tetap menggambarkan komitmen masyarakat dalam mendukung pembangunan. Bapak Irfan, Kaur Umum Desa Wangandalem, menegaskan:

“Keterlibatan masyarakat dalam bentuk tenaga, walaupun tanpa dibayar mereka tetap berpartisipasi aktif didalamnya”.

Pernyataan ini menyoroti bahwa meskipun tidak ada imbalan materi, masyarakat tetap menunjukkan partisipasi tinggi dalam kegiatan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kebersamaan dan semangat gotong royong yang telah diwariskan turun-temurun menjadi dasar kuat bagi warga untuk turut serta dalam kegiatan tersebut.

Tokoh masyarakat lainnya, Bapak Tansrif, juga memberikan pandangan serupa:

“Apabila ada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, masyarakat dengan sukarela turut membantu Pemerintah Desa Wangandalem dalam menyelesaikan proyek pembangunan tersebut”.

Hal senada diungkapkan oleh informan lain yang diwawancarai yaitu Ibu Nurhayati yang mengatakan bahwa:

“Mengenai keterlibatan masyarakat dalam bentuk tenaga, mereka tetap aktif dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan baik mereka dibayar maupun tidak dibayar”.

Pernyataan Ibu Nurhayati ini menegaskan bahwa semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial di Desa Wangandalem lebih penting daripada imbalan materi. Masyarakat merasa terpenggil untuk turut serta dalam pembangunan demi kebaikan bersama.

Dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk fisik, seperti kegiatan gotong royong, merupakan salah satu tradisi yang telah lama ada di Desa Wangandalem. Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan semangat kerja sama yang kuat, tetapi juga menunjukkan bahwa warga desa memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Meskipun terdapat beberapa tantangan terkait dengan partisipasi merata, semangat gotong royong ini tetap menjadi bagian integral dari proses pembangunan di desa, dan menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menghasilkan hasil yang lebih baik bagi kepentingan bersama.

c. Partisipasi Finansial

Partisipasi dalam tahap ini, masyarakat memberikan kontribusi dana, baik secara sukarela maupun melalui iuran wajib untuk mendukung

pembangunan (Juk *et al.*, 2024). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Wangandalem, diketahui bahwa pembangunan yang dilaksanakan di desa ini memerlukan biaya yang cukup besar. Dana yang digunakan sebagian besar berasal dari swadaya masyarakat, lebih banyak dibandingkan dengan dana yang diterima dari bantuan Inpres Desa.

Dalam wawancara, Bapak Siswondo, selaku Kepala Desa Wangandalem, menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pembangunan, kami biasanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagi mereka yang ingin berpartisipasi, dapat memberikan bantuan dalam bentuk uang sebagai bagian dari swadaya masyarakat. Namun, kami tidak memaksakan hal ini, karena kami menyadari bahwa kami tidak bisa sepenuhnya bergantung pada dana yang tersedia dari pemerintah kabupaten. Secara umum, respon masyarakat terhadap ajakan ini cukup baik”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun partisipasi dalam bentuk sumbangan uang tidak diwajibkan, respons masyarakat terhadap ajakan tersebut sangat positif, karena mereka menyadari pentingnya kontribusi mereka untuk kelancaran pembangunan desa. Selain itu, Bapak Irfan, Kaur Umum Desa Wangandalem, menambahkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme sumbangan:

“Terkait dengan sumbangan dalam bentuk uang, masyarakat diberikan kebebasan untuk menyumbangkan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya, tanpa ada paksaan. Jumlah sumbangan sepenuhnya bergantung pada kesediaan dan keikhlasan masing-masing individu. Bahkan masyarakat dapat memberikan sumbangan dalam bentuk materi seperti kayu, balok-balok, pasir, gerobak dan lain lain”.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa sumbangan masyarakat didasarkan pada keikhlasan dan tidak ada tekanan untuk menyumbang, baik dalam bentuk uang maupun barang. Kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan

mereka, sehingga mendorong semangat gotong royong yang lebih inklusif. Pandangan serupa disampaikan oleh Bapak Tansrif, salah satu tokoh masyarakat, yang mengatakan:

“Masyarakat menyumbang berdasarkan hati nurani mereka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bahkan, beberapa di antara mereka tidak memberikan sumbangan dalam bentuk uang, melainkan berkontribusi melalui tenaga atau kerja fisik”.

Partisipasi dalam pembangunan di Desa Wangandalem sangat beragam. Tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa sumbangan dalam bentuk tenaga kerja atau barang yang dibutuhkan. Ibu Nurhayati, seorang informan yang juga terlibat dalam kegiatan pembangunan, menyatakan:

“Jika pembangunan dilaksanakan, biasanya banyak masyarakat yang turut menyumbangkan uang atau menyumbangkan alat-alat kerja seperti sekop dan linggis”.

Hal ini menunjukkan bahwa selain sumbangan uang, alat-alat kerja pun menjadi kontribusi penting bagi kelancaran pembangunan fisik di desa.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wangandalem sangat bergantung pada kesadaran dan niat baik warga untuk berkontribusi. Sumbangan dalam bentuk uang atau barang tidak dipaksakan, tetapi lebih merupakan hasil dari rasa tanggung jawab sosial dan semangat kebersamaan yang tinggi. Sebagai hasilnya, sumbangan masyarakat tahun ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan pendapatan mereka dari sektor perkebunan dan pertanian. Oleh karena itu, besaran sumbangan yang diberikan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan kemampuan ekonomi masing-masing individu.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dana di Desa Wangandalem mencerminkan keinginan kuat

mereka untuk ikut serta dalam pembangunan daerahnya. Dengan adanya rasa kebersamaan yang tinggi, masyarakat tidak hanya memberikan dana, tetapi juga kontribusi dalam bentuk barang dan tenaga, yang semuanya mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan

2. Factor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wangandalem

Dalam penelitian ini, penulis membahas berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam mendukung kelancaran pembangunan di Desa Wangandalem.

A. Faktor Pendukung

1. Faktor Kesadaran/ Kemauan

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Secara umum, masyarakat turut aktif dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan di desanya. Jika diklasifikasikan secara ideal, menurut pandangan penulis, terdapat empat bentuk partisipasi masyarakat Desa Wangandalem dalam pembangunan. Keempat bentuk tersebut meliputi: partisipasi dalam bentuk ide atau pemikiran (non-fisik), kontribusi dana (uang), sumbangan materi (barang), serta partisipasi langsung dalam bentuk tenaga atau kerja fisik.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam partisipasi masyarakat adalah kesediaan untuk berkontribusi demi keberhasilan setiap program pembangunan, sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Partisipasi ini tidak harus berupa pengorbanan terhadap kepentingan pribadi, namun cukup dengan memberikan dukungan yang proporsional. Dalam hal ini, partisipasi non-fisik memiliki peran yang sangat mendasar, khususnya pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan wawancara langsung dengan beberapa informan, diketahui bahwa mayoritas dari mereka sangat aktif mengikuti rapat serta memberikan pendapat dan saran. Hal ini disebabkan karena mereka selalu diundang oleh Pemerintah Desa untuk menghadiri rapat, selain adanya kesadaran pribadi untuk turut mendukung terlaksananya pembangunan.

Hal ini sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Bapak Siswondo selaku Kepala Desa Wangandalem menyatakan bahwa:

“Kami sering mengundang masyarakat setiap kali ada rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Namun, yang datang biasanya hanya itu-itu saja, yaitu orang-orang yang aktif berbicara. Sedangkan mereka yang kurang aktif cenderung hanya datang untuk mendengarkan. Meskipun demikian, mereka biasanya lebih aktif saat pelaksanaan pembangunan di lapangan”.

Di sisi lain, terdapat juga informan yang kurang aktif atau bahkan tidak aktif dalam memberikan saran maupun pendapat. Penyebabnya antara lain karena mereka tidak pernah diundang mengikuti rapat, serta ada sebagian masyarakat yang pasif karena merasa kurang mampu berbicara di depan umum.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nuraini menyatakan bahwa:

“Biasa diundang, kadang saya aktif memberikan sumbangsi, kadang juga tidak”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu diundang setiap kali ada rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Meskipun tingkat partisipasi non-fisik masyarakat tergolong sedang, hal ini tidak berarti bahwa ide dan pemikiran yang

berasal dari masyarakat tidak diakomodasi secara proporsional dalam proses pembangunan.

Selain itu, masyarakat juga diberi keleluasaan untuk berpartisipasi dalam bentuk sumbangan dana, material, maupun tenaga. Pemerintah desa tidak memaksakan partisipasi tersebut; semuanya sepenuhnya bergantung pada kesediaan masyarakat. Meskipun sumbangan uang tidak diwajibkan, respons masyarakat terhadap ajakan tersebut sangat positif, karena mereka menyadari pentingnya kontribusi mereka untuk kelancaran pembangunan desa.

Bapak Irfan, Kaur Umum Desa Wangandalem, juga menambahkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme sumbangan, yang akan dijelaskan sebagai berikut

“Terkait dengan sumbangan dalam bentuk uang, masyarakat diberikan kebebasan untuk menyumbangkan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya, tanpa ada paksaan. Bahkan masyarakat dapat memberikan sumbangan dalam bentuk materi seperti kayu, balok-balok, pasir, gerobak dan lain lain”.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa sumbangan masyarakat didasarkan pada keikhlasan dan tidak ada tekanan untuk menyumbang, baik dalam bentuk uang maupun barang. Kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mendorong semangat gotong royong yang lebih inklusif. Pandangan serupa disampaikan oleh Bapak Tansrif, salah satu tokoh masyarakat, yang mengatakan:

“Masyarakat menyumbang berdasarkan hati nurani mereka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bahkan, beberapa di antara mereka tidak memberikan sumbangan dalam bentuk uang, melainkan berkontribusi melalui tenaga atau kerja fisik”.

Partisipasi dalam pembangunan di Desa Wangandalem sangat beragam. Tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa sumbangan

dalam bentuk tenaga kerja atau barang yang dibutuhkan. Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut hasil pengamatan bakti atau gotong royong sekali dalam seminggu atau minimal dua kali dalam sebulan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti membersihkan saluran air, perbaikan jalan, membersihkan kantor Desa, membuat atau memperbaiki jembatan serta kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat.

Ibu Nurhayati, seorang informan yang juga terlibat dalam kegiatan pembangunan, menyatakan:

“Jika pembangunan dilaksanakan, biasanya banyak masyarakat yang turut menyumbangkan uang atau menyumbangkan alat-alat kerja seperti sekop dan linggis. Mereka juga tetap aktif dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan baik mereka dibayar maupun tidak dibayar”.

Hal ini menunjukkan bahwa selain sumbangan uang, alat-alat kerja juga menjadi kontribusi yang penting bagi kelancaran pembangunan fisik di desa. Mengenai partisipasi tenaga, berdasarkan pengamatan langsung peneliti dan data yang diperoleh melalui informan, diketahui bahwa partisipasi dalam bentuk fisik, seperti kegiatan gotong royong, merupakan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun di masyarakat Desa Wangandalem. Alasan lain di balik partisipasi ini adalah adanya rasa kebersamaan di antara masyarakat untuk turut serta membangun daerah mereka.

2. Pengaruh Orang Lain

Masyarakat telah memiliki pemahaman yang jelas mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Menurut para informan, salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaruh dari orang lain, yang mendorong mereka untuk ikut

terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembangunan tersebut.

Dalam wawancara, Bapak Siswondo, selaku Kepala Desa Wangandalem, menyatakan bahwa:

“Banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi karena dorongan dari masyarakat lain. Mereka memiliki rasa solidaritas yang tinggi sesama warga untuk saling membantu. Kami juga memang sudah terbiasa dengan tradisi kerja gotong royong. Namun, terkadang ada kendala, karena beberapa warga yang seharusnya berpartisipasi sedang bekerja atau memiliki kesibukan lain”.

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana faktor sosial dan solidaritas menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Meski demikian, beliau juga mengakui adanya kendala, di mana beberapa warga yang ingin berpartisipasi terkendala oleh pekerjaan atau kegiatan lainnya, yang mengurangi tingkat partisipasi mereka dalam beberapa kegiatan.

Bapak Irfan, Kaur Umum Desa Wangandalem, menambahkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme sumbangan:

“Alasan masyarakat ikut berpartisipasi adalah karena mereka masih memiliki rasa kebersamaan yang kuat dengan sesama warga. Rasa saling membantu ini mendorong mereka untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan”.

Pernyataan Bapak Irfan semakin menegaskan bahwa rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama menjadi faktor yang sangat kuat dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Solidaritas sosial ini membentuk ikatan yang kuat antara warga dan menciptakan kesadaran kolektif untuk turut serta dalam pembangunan bersama. Pandangan serupa disampaikan oleh Bapak Tansrif, salah satu tokoh masyarakat, yang mengatakan:

“Kami ikut berpartisipasi karena kami merasa dalam lingkungan masyarakat ini sudah seperti keluarga sendiri dengan sesama warga masyarakat, dan kami juga memang terbiasa akan kerja gotong royong”.

Pernyataan tersebut menggambarkan kedekatan antarwarga yang telah terjalin erat, sehingga kegiatan pembangunan menjadi semacam kewajiban bersama. Selain itu, tradisi gotong royong yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat desa juga berperan besar dalam membentuk pola pikir dan kebiasaan mereka untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan.

Ibu Nurhayati, seorang informan yang juga terlibat dalam kegiatan pembangunan, menyatakan:

“Kami turut berpartisipasi karena mereka masih punya rasa solidaritas yang tinggi sesama warga masyarakat untuk saling membantu”.

Ibu Nurhayati menekankan bahwa rasa solidaritas yang tinggi antarwarga adalah alasan utama mereka untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan, meskipun partisipasi mereka tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga dalam bentuk tenaga dan bantuan lain yang dibutuhkan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa motivasi utama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Wangandalem adalah pengaruh dari lingkungan sosial mereka, di mana rasa solidaritas dan kebersamaan antarwarga memainkan peran penting. Masyarakat merasa terdorong untuk berkontribusi karena mereka melihat kegiatan pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab bersama yang mencerminkan ikatan kekeluargaan dan kepedulian terhadap kemajuan desa. Tradisi kerja gotong royong yang telah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari

turut memperkuat motivasi masyarakat untuk ikut terlibat. Namun, meskipun semangat kebersamaan ini sangat kuat, kendala seperti pekerjaan atau kesibukan lain tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan partisipasi masyarakat yang maksimal.

3. Pemerintah

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wangandalem tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat.

Masyarakat merupakan gabungan dari individu-individu yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menyatukan mereka, dibutuhkan suatu kekuatan, yaitu kemampuan pendinamisan oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat sangat penting dalam membina dan mengarahkan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, hal sebaliknya dapat terjadi jika kepemimpinan yang diterapkan bertentangan dengan sifat dan karakter masyarakat yang dipimpin.

Untuk keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diperlukan kepemimpinan yang mampu menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat. Dengan kepemimpinan yang baik dan terarah, pemerintah akan dapat mendorong masyarakat untuk patuh dan taat, sehingga kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya unsur paksaan atau keterpaksaan.

B. Faktor Penghambat

1. Tingkat Pendidikan Rendah

Pembangunan dalam bentuk ide dan pemikiran biasanya diajukan oleh individu-individu yang memiliki tingkat pendidikan yang

lebih tinggi. Selain itu, banyak di antara peserta rapat pembahasan pembangunan adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi.

Dalam wawancara, Bapak Siswondo, selaku Kepala Desa Wangandalem, menyatakan bahwa:

“Pada saat pembahasan pembangunan, terkadang jumlah peserta yang hadir lebih banyak berasal dari kalangan yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Beberapa di antaranya juga jarang memberikan masukan dalam rapat. Berdasarkan data yang kami peroleh, mereka termasuk dalam kategori orang yang berpendidikan SMP dan SMA”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki kesempatan untuk hadir dalam rapat pembangunan, partisipasi aktif mereka dalam memberikan masukan tidak selalu maksimal. Hal ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai topik pembahasan atau rasa kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat

Bapak Irfan, Kaur Umum Desa Wangandalem, menambahkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme sumbangan:

“Terkadang, dalam rapat musrenbang, jumlah peserta yang hadir lebih banyak terdiri dari orang-orang yang kurang memahami pembahasan atau yang merasa kurang mampu untuk berbicara. Sebagian besar dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, seperti lulusan SMP dan SMA”.

Pernyataan Bapak Irfan memperjelas bahwa faktor pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman dan kenyamanan seseorang dalam memberikan kontribusi dalam rapat. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah mungkin merasa

kesulitan untuk mengikuti pembahasan atau merasa tidak cukup berpengetahuan untuk berbicara di depan umum. Pandangan serupa disampaikan oleh Bapak Tansrif, salah satu tokoh masyarakat, yang mengatakan:

“Kebanyakan masyarakat yang hadir dalam rapat musrenbang adalah mereka yang dapat memberikan ide dan gagasan. Tingkat pendidikan mereka bervariasi, ada yang hanya sampai tingkat SMP atau SMA”.

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun ada sebagian warga yang hadir dengan membawa ide dan gagasan, mayoritas peserta rapat memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, yang kadang-kadang membatasi kemampuan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi yang lebih mendalam.

Ibu Nurhayati, seorang informan yang juga terlibat dalam kegiatan pembangunan, menyatakan:

“Dalam rapat musrenbang, seringkali yang hadir adalah masyarakat yang kurang memahami topik pembahasan, serta mereka yang merasa kurang mampu untuk berbicara”.

Hal ini mengonfirmasi bahwa tidak semua peserta rapat merasa nyaman atau mampu untuk berpartisipasi secara aktif. Perasaan kurang memahami atau kurang percaya diri dapat menjadi hambatan bagi mereka untuk menyampaikan pendapat atau gagasan yang bermanfaat dalam rapat pembangunan.

Sehingga berdasarkan wawancara-wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat Desa Wangandalem hadir dalam rapat pembahasan pembangunan, seringkali yang hadir adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau yang merasa kurang mampu untuk berbicara. Sebagian besar peserta berasal dari kalangan yang hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SMP atau

SMA, yang terkadang membatasi pemahaman dan partisipasi aktif mereka dalam rapat tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya usaha untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan warga dalam rapat pembangunan, dengan cara memberikan pelatihan atau informasi yang dapat membantu mereka memahami topik-topik yang dibahas dan membangun rasa percaya diri untuk berpartisipasi lebih aktif.

2. Tingkat Penghasilan yang Rendah

Partisipasi masyarakat dengan penghasilan tinggi dan sedang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Selain itu, banyak di antara peserta rapat pembahasan pembangunan adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi.

Dalam wawancara, Bapak Siswondo, selaku Kepala Desa Wangandalem, menyatakan bahwa:

“Jika dilihat dari partisipasi masyarakat dalam bentuk uang, kebanyakan berasal dari masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi, atau yang dapat dikatakan sebagai golongan "berada". Sementara itu, masyarakat dengan penghasilan rendah terkadang lebih memilih untuk menyumbangkan tenaga mereka dalam mendukung pembangunan”.

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya kecenderungan bahwa masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan dalam bentuk uang, yang mungkin lebih mudah mereka berikan karena tingkat ekonomi mereka yang lebih mapan. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah, yang mungkin tidak memiliki dana lebih untuk disumbangkan, lebih memilih untuk menyumbangkan tenaga dalam kegiatan fisik seperti gotong royong atau kerja bakti. Bapak Irfan, Kaur Umum Desa Wangandalem, menambahkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme sumbangan:

“Jika dilihat dari segi uang, kebanyakan sumbangan berasal dari masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi, atau yang dapat disebut sebagai golongan "berada". Sementara itu, masyarakat dengan penghasilan rendah biasanya lebih memilih untuk menyumbangkan tenaga mereka dalam mendukung pembangunan”.

Hal ini menunjukkan pola yang konsisten di mana masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dapat memberikan kontribusi dalam bentuk uang, sementara mereka yang berpenghasilan rendah, meskipun kurang mampu memberikan sumbangan uang, tetap aktif berpartisipasi dengan cara yang berbeda, yaitu melalui sumbangan tenaga.

Pandangan serupa disampaikan oleh Bapak Tansrif, salah satu tokoh masyarakat, yang mengatakan:

“Faktor penghasilan juga memengaruhi partisipasi masyarakat. Mereka yang memiliki penghasilan lebih cenderung menyumbangkan partisipasinya dalam bentuk uang, sementara masyarakat yang berpenghasilan rendah biasanya lebih memilih untuk menyumbangkan tenaga mereka”.

Pernyataan tersebut semakin memperjelas bahwa meskipun tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi, bentuk kontribusi mereka bervariasi tergantung pada kemampuan finansial masing-masing individu. Ibu Nurhayati, seorang informan yang juga terlibat dalam kegiatan pembangunan, menyatakan:

“Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang umumnya berasal dari mereka yang berpenghasilan lebih tinggi, atau yang dapat disebut sebagai golongan "berada". Sementara itu, masyarakat dengan penghasilan rendah cenderung lebih memilih untuk menyumbangkan tenaga mereka”.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa

Wangandalem sangat dipengaruhi oleh penghasilan mereka. Masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi, atau yang termasuk dalam golongan "berada", lebih cenderung memberikan sumbangan dalam bentuk uang. Sementara itu, masyarakat yang memiliki penghasilan rendah lebih memilih untuk berpartisipasi melalui sumbangan tenaga mereka. Kedua bentuk partisipasi ini, baik dalam bentuk uang maupun tenaga, saling melengkapi dan menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan di desa.

BAB IV

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA WANGANDALEM

A. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA WANGANDALEM

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan di Desa Wangandalem, terlihat bahwa masyarakat menunjukkan keterlibatan aktif, khususnya dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menunjukkan praktik partisipasi yang substansial dan bermakna.

1. Tingkat Partisipasi: Perspektif Arnstein

Mengacu pada teori "Ladder of Citizen Participation" oleh Sherry R. Arnstein, (1969), partisipasi masyarakat di Desa Wangandalem dapat dikategorikan berada pada tingkat "Partnership". Pada tingkat ini, masyarakat tidak hanya diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga dilibatkan secara sejajar dengan pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Ciri khas dari tingkat *Partnership* antara lain:

- a. Masyarakat memiliki kuasa tawar dalam musyawarah desa.
- b. Keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.
- c. Adanya kolaborasi nyata antara warga dan pemerintah desa, bukan sekadar konsultasi satu arah.

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Wangandalem telah melampaui bentuk partisipasi yang dangkal seperti *Consultation* atau *Placation*, di mana suara masyarakat hanya dijadikan formalitas tanpa pengaruh nyata terhadap keputusan.

2. Bentuk Partisipasi: Tipologi Cohen & Uphoff

Lebih lanjut, berdasarkan tipologi partisipasi menurut Cohen, (1980), partisipasi warga Desa Wangandalem mencakup empat dimensi utama:

- a. Partisipasi Fisik (Physical Participation): Terwujud dalam bentuk gotong royong dan kerja bakti masyarakat dalam memperbaiki jalan dan infrastruktur lainnya. Ini menunjukkan keterlibatan langsung yang kuat dan menjadi praktik sosial yang mengakar.
- b. Partisipasi Material (Material Participation): Ditandai dengan sumbangan sukarela berupa bahan bangunan maupun dana, mencerminkan komitmen dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan desa.
- c. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (Decisional Participation): Terlihat dari kehadiran warga dalam musyawarah desa dan keberanian menyuarakan aspirasi. Ini mengindikasikan tingkat kepercayaan dan keterbukaan antara masyarakat dan pemerintah desa.
- d. Partisipasi dalam Manfaat (Beneficiary Participation): Masyarakat tidak hanya berkontribusi, tetapi juga menikmati hasil pembangunan, serta merasa memiliki atas hasil tersebut. Ini penting dalam membangun rasa kepemilikan dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

3. Implikasi Sosial dan Politik

Partisipasi yang aktif dan menyeluruh seperti di Wangandalem memberikan manfaat ganda: di satu sisi mempercepat pembangunan secara teknis, di sisi lain memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Praktik gotong royong yang masih hidup menjadi bukti bahwa nilai-nilai lokal dan budaya kolektif masih menjadi kekuatan dalam pembangunan desa.

Hal ini sejalan dengan pandangan Agustin (2020), yang menekankan bahwa warga yang berpartisipasi aktif tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan telah menjadi subjek yang berdaulat dalam menentukan arah kebijakan desa.

Pengalaman Desa Wangandalem menunjukkan bahwa pembangunan desa yang demokratis dan inklusif dapat tercapai jika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap proses pembangunan. Tingkat partisipasi pada level *Partnership* serta keberagaman bentuk keterlibatan warga menjadi indikator kuat bahwa desa ini telah membangun tata kelola pemerintahan yang sehat dan berbasis masyarakat.

B. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA WANGANDALEM

Pembangunan desa tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Desa Wangandalem merupakan contoh nyata bagaimana pembangunan berbasis komunitas dapat berjalan dengan baik melalui keterlibatan warga dalam berbagai bentuk. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, baik pendukung maupun penghambat, dengan mengaitkannya pada teori-teori pembangunan dan partisipasi masyarakat.

1. Faktor Pendukung

a. Faktor Kesadaran/ Kemauan

Partisipasi aktif masyarakat Desa Wangandalem terwujud dalam berbagai bentuk: ide atau pemikiran, kontribusi dana, sumbangan barang, dan tenaga kerja. Ini sejalan dengan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1977), yang membagi partisipasi menjadi beberapa bentuk: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.

Masyarakat menunjukkan keinginan kuat untuk berkontribusi, meskipun tidak semua aktif dalam forum diskusi. Hal ini sesuai dengan Arnstein (1969) dalam konsep *Ladder of Citizen Participation*, yang menunjukkan bahwa keterlibatan warga bisa berada pada berbagai tingkat, dari partisipasi simbolik hingga kemitraan sejati. Di Wangandalem,

masyarakat umumnya berada di level konsultasi hingga kemitraan, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan.

Davis, (1985) juga menekankan bahwa partisipasi muncul karena adanya rasa memiliki (sense of belonging) dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Partisipasi dalam bentuk gotong royong yang masih kuat di Wangandalem mencerminkan nilai ini. Bahkan warga yang tidak memiliki kemampuan finansial tetap dapat berpartisipasi secara fisik, misalnya dengan kerja bakti atau menyumbangkan alat kerja.

b. Pengaruh Orang Lain

Rasa kebersamaan dan ikatan emosional antarwarga menjadi pendorong utama keterlibatan dalam pembangunan. Ini dapat dijelaskan melalui konsep modal sosial (Putnam, 1993), yaitu hubungan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan, norma, dan jaringan. Desa Wangandalem memiliki modal sosial yang kuat dalam bentuk gotong royong dan kerja kolektif yang berkelanjutan.

Emile Durkheim, (1895) dalam konsep solidaritas mekanik menjelaskan bahwa masyarakat tradisional cenderung kompak karena nilai-nilai yang seragam dan keterikatan emosional yang erat. Hal ini tercermin dalam pernyataan warga yang menyebutkan bahwa mereka merasa seperti keluarga besar, sehingga saling membantu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari.

c. Pemerintah

Partisipasi tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, melainkan perlu difasilitasi oleh kepemimpinan yang inklusif dan responsif. Dalam hal ini, peran pemerintah desa sangat penting. James MacGregor Burns (1978) melalui teori kepemimpinan transformasional menyebutkan bahwa pemimpin yang mampu memotivasi dan memberi inspirasi kepada masyarakat akan lebih efektif dalam mendorong keterlibatan.

Pemerintah Desa Wangandalem secara aktif mengundang masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan, menciptakan ruang dialog dan pemberian masukan. Hal ini selaras dengan prinsip good governance (UNDP, 1997) yang menekankan pentingnya partisipasi sebagai salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Faktor Penghambat

a. Tingkat Pendidikan Rendah

Meskipun warga diundang dalam musyawarah pembangunan, banyak di antara mereka yang hanya menjadi pendengar pasif. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan. Paulo Freire dalam konsep pendidikan kritis menyatakan bahwa pendidikan adalah alat pemberdayaan; tanpa pemahaman yang baik, warga akan kesulitan berpartisipasi secara substantif dalam proses pembangunan.

Pernyataan warga dan perangkat desa mengungkapkan bahwa peserta musyawarah sering kali berasal dari kalangan berpendidikan SMP dan SMA, yang merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Ini memperkuat teori partisipasi Cohen dan Uphoff, bahwa partisipasi tidak hanya memerlukan kemauan, tetapi juga kemampuan intelektual dan komunikatif.

b. Tingkat Penghasilan yang Rendah

Faktor ekonomi juga menjadi penghambat. Warga dengan penghasilan rendah lebih memilih menyumbang tenaga daripada uang. Teori kebutuhan dasar dari ILO menyebutkan bahwa individu akan cenderung fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok sebelum mampu berkontribusi dalam bentuk materi. Di sisi lain, mereka tetap memiliki semangat berkontribusi, walaupun dalam bentuk tenaga atau alat kerja.

George Ritzer dalam teori stratifikasi sosial menyatakan bahwa perbedaan kelas ekonomi dapat menciptakan kesenjangan dalam partisipasi. Di Wangandalem, warga yang berada di golongan ekonomi atas

lebih mampu menyumbang dana, sementara warga dengan penghasilan rendah lebih fokus pada kontribusi fisik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat Desa Wangandalem dalam pembangunan infrastruktur terbagi dalam tiga bentuk utama: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi fisik, dan partisipasi finansial.
2. Secara keseluruhan, keberhasilan partisipasi masyarakat di Desa Wangandalem dapat dilihat dari kombinasi beberapa faktor: kesadaran warga yang tinggi, rasa solidaritas dan kebersamaan yang kuat, serta kepemimpinan yang efektif dari pemerintah desa. Namun, faktor penghambat seperti rendahnya tingkat pendidikan dan penghasilan tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi agar partisipasi bisa lebih merata dan maksimal.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan sebagai implikasi praktis dari pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun tingkat partisipasi cukup tinggi, upaya untuk meningkatkan partisipasi yang lebih merata, terutama dari kelompok yang kurang terlibat, seperti warga dengan pendidikan atau pendapatan rendah, perlu terus didorong. Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan partisipasi, kolaborasi yang erat antara pemerintah desa dan masyarakat harus terus diperkuat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, serta mengoptimalkan mekanisme partisipasi yang inklusif dan transparan.
2. Mengatasi hambatan dalam partisipasi masyarakat di Desa Wangandalem memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang mencakup aspek pendidikan, ekonomi, kepemimpinan, serta penggunaan teknologi. Dengan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, mengoptimalkan saluran komunikasi, dan menyesuaikan kegiatan pembangunan dengan kebutuhan

mereka, desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih inklusif dan efektif. Dengan demikian, partisipasi yang lebih merata dari berbagai lapisan masyarakat akan semakin memperkuat proses pembangunan yang berkelanjutan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 4(1): 1–14.
- Cohen, U. 1980. Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3). Tersedia di [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X).
- Davis, K. 1985. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. New York: Mc.Graw Hill.
- Emile Durkheim 1895. *The Rules of Sociological Method*. New York: free press.
- Fatmawati, R. 2024. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PUTEMATA KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 3(1): 196–212.
- Hardani 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Juk, B., Shaw, F.R., Alaydrus, A. & Hastira, M.F. 2024. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *IJD: International Journal of Demos*, 6(3): 242–258.
- Mahendra, A., Maesaroh, M. & Widowati, N. 2022. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(1): 1–13.
- Mulyadi Muhammad 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Ciputat: Nadi Pustaka.
- Netrianni Sipatuhar 2023. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA DESA RUMAH BERASTAGI KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO. *FKIP: Universitas Medan*.
- Nursapia, H. 2020. *Penelitian kualitatif*. Medan: Wal Ashri.
- Palimbunga, I.P. 2017. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian Pariwisata Budaya. *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa*, 01(02): 15–32. Tersedia di <https://www.neliti.com/publications/236290/bentuk-partisipasi-masyarakat->

dalam-pengembangan-pariwisata-di-kampung-wisata-ta.

- Putnam, R. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. American Prospect*.
- Putri Daulay, H.G. 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. *Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 1(2): 1.
- Rahman, A. & Rosmita 2019. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembagunan Infrastruktur di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 1(2): 57–75.
- Riskayanti 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonmpo Kabupaten Gowa. *KIMAP: kAJIAN Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(3): 1–15.
- Sherry R. Arnstein 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4): 216–224.
- Suaib 2023. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Tersedia di [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Sugiyono 2016. *Motode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, N. & Muluk, S. 2008. *Musyawah Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota*. Studio Dria Media-OC FPPM. Tersedia di http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/PanduanMusrenbang/Musrenbang_Kab_Kota.pdf.
- Suja, A., Siregar, A.K. & Alfa, A. 2025. Strategi Peningkatan Infrastruktur Desa untuk Mendorong Perekonomian di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa. *Ebisnis Manajemen*, 3(1).
- Agustin 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 4(1): 1–14.
- Cohen, U. 1980. Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3). Tersedia di [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X).
- Davis, K. 1985. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. New York: Mc.Graw Hill.
- Emile Durkheim 1895. *The Rules of Sociological Method*. New York: free press.

- Fatmawati, R. 2024. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PUTEMATA KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 3(1): 196–212.
- Hardani 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Juk, B., Shaw, F.R., Alaydrus, A. & Hastira, M.F. 2024. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *IJD: International Journal of Demos*, 6(3): 242–258.
- Mahendra, A., Maesaroh, M. & Widowati, N. 2022. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(1): 1–13.
- Mulyadi Muhammad 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Ciputat: Nadi Pustaka.
- Netrianni Sipatuhar 2023. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA DESA RUMAH BERASTAGI KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO. *FKIP: Universitas Medan*.
- Nursapia, H. 2020. *Penelitian kualitatif*. Medan: Wal Ashri.
- Palimbunga, I.P. 2017. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian Pariwisata Budaya. *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa*, 01(02): 15–32. Tersedia di <https://www.neliti.com/publications/236290/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pengembangan-pariwisata-di-kampung-wisata-ta>.
- Putnam, R. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. American Prospect*.
- Putri Daulay, H.G. 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. *Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 1(2): 1.
- Rahman, A. & Rosmita 2019. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 1(2): 57–75.
- Riskayanti 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonmpo Kabupaten Gowa. *KIMAP: kAJIAN Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(3): 1–15.

- Sherry R. Arnstein 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4): 216–224.
- Suaib 2023. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Tersedia di [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Sugiyono 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, N. & Muluk, S. 2008. *Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota*. Studio Dria Media-OC FPPM. Tersedia di [http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/PanduanMusrenbang/Musren bang_Kab_Kota.pdf](http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/PanduanMusrenbang/Musrenbang_Kab_Kota.pdf).
- Suja, A., Siregar, A.K. & Alfa, A. 2025. Strategi Peningkatan Infrastruktur Desa untuk Mendorong Perekonomian di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa. *Ebisnis Manajemen*, 3(1).

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Irfan
Jabatan : Karu Desa Wangandalem
Waktu wawancara : -

B. TANGGAPAN INFORMAN

I. Informan Kepala Dusun

- a. Apakah anda di ikutkan dalam proses pembangunan?
.....
- b. Apakah masyarakat biasa diundang dalam perencanaan pembangunan dan memberikan masukan ?
.....
- c. Jika dalam pembangunan membutuhkan sumbangan, apakah anda ikut menyumbang (apakah dalam bentuk uang, peralatan, bahan atau lain-lain)?
.....

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Tasrif

Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Wangandalem

Waktu wawancara : -

B. TANGGAPAN INFORMAN

I. Informan Tokoh Masyarakat

- a. Apakah anda biasa diundang atau dilibatkan dalam perencanaan pembangunan ?

.....
.....

- b. Apakah masyarakat biasa memberikan ide atau gagasan dalam perencanaan pembangunan ?

.....
.....

- c. Apakah masyarakat dalam memberikan sumbangan tidak ada paksaan dari pemerintah (dalam bentuk apa sumbangan masyarakat itu) ?

.....
.....

PEDOMAN OBSERVASI

A. IDENTITAS TEMPAT OBSERVASI

1. Nama tempat : Kantor Desa Wangandalem
2. Alamat : Desa Wangandalem
3. Waktu Observasi : -

B. HAL-HAL YANG DI OBSERVASI

1. Strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung kelancaran pembangunan Desa.
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam mendukung kelancaran pembangunan Desa.
3. Kesimpulan observer.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khusuhal Aribina

TTL : Brebes, 01 Maret 1999

Alamat : Jalan Pramuka Jatibarang Kidul

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jurusan / Prodi : Ilmu Politik

Pendidikan :

- a) SD : MI 02 Jatibarang
- b) SMP : SMPN 01 Jatibarang
- c) SMA : MA Darunnajat

Pengalaman :

- a) Ketua Kkn Rdr 77 Kelompok 77
- b) Ketua Forum Santri Darunnajat Semarang Tahun 2019-2020

Email : khusuhaliiebina@gmail.com

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagai mana semestinya.

Semarang, 11 JUNI 2025

Khusuhal Aribina

NIM. 1806016103